



Rancangan Rencana Kerja

RENJA

TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Kompleks Perkantoran Bupati Gedung Kembar B Lantai Dasar
Jalan Wolter Monginsidi, Telp. (0541) 662295-6666380



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-~~PD~~ Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-~~PD~~ Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk perencanaan 1 (satu) tahun.
8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
16. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

BAB II RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

BAB II RUANG LINGKUP RENSTRA

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam merumuskan rancangan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
 - BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN
 - BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
 - BAB VIII : PENUTUP
- (2) Rincian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

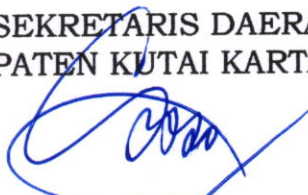
Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 26 September 2021

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 26 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,


SUNGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021 NOMOR 13

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur Alhamdulillah Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023.

Rencana Kerja (RENJA) ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023, capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kami menyadari Rencana Kerja (RENJA) ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran masukan dari semua pihak yang berkepentingan dalam rangka perbaikan selanjutnya.

Diharapkan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara 2023 ini dapat dijadikan acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara “ ***Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berbahagia*** “

Tenggarong, Maret 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Kutai Kartanegara



Dr. H. BAMBANG ARWANTO, AP., M.Si
NIP. 19740111 199311 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman	
Judul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
Bab II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU ..	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	15
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	16
2.4. Review terhadap Rancangan Awal PD	20
Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PD	30
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2. Tujuan dan Sasaran PD	31
Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	33
4.1. Program dan Kegiatan	33
Bab V. PENUTUP	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun dokumen perencanaan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) untuk periode selama 1 (satu) tahun sebagai langkah strategis dalam mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang ingin capai dalam perencanaan jangka menengah.

Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan terjemahan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan serta mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005–2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);

20. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

b. Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2023

.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA – PD TAHUN LALU

Bab ini menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD, serta Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan Kebijakan Terhadap Kebijakan Program Nasional, Tujuan dan Sasaran PD.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA PD

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 dan Capaian RENSTRA serta Pengukuran capaian kinerja tentang pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya dan pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan, diuraikan pada tabel 1 berikut :

TABEL T - C. 29.

REKAPTULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan) Kabupaten Kutai Kartanegara

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target kinerja capaian program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan realisasi kinerja program dan kkegiatan Tahun Berjalan (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD tahun 2022)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra -PD s/d tahun berjalan (2022)	
									Target RENJA - PD TAHUN (2021)	Realisasi RENJA - PD Triwulan (2021)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	1			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
2	18	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran & Evaluasi Kinerja								

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2023

2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	12		2	2	100%	2	1	8%
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	6		1	1	100%	1	1	17%
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahann RKA - SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	6		1	1	100%	-		
2	18	01	2.01	04	Koordinasi Dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	6		1	1	100%	1	1	17%
2	18	01	2.01	05	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	6		1	1	100%	1		
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja	36		6	6	100%	6	2	6%
2	18	01	2.02		Adiminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan								
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	546		91	91	100%	91	91	17%
2	18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah Pendukung Non ASN	98		49	49	100%			
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen	6		1	1	100%	3	1	17%
2	18	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Tanggapan	30		5	5	100%	5	3	10%

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2023

2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	18		3	3	100%	3	2	11%
2	18	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Arsip	6		1	1	100%	1	1	17%
2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi BMD								
2	18	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	6		1	1	100%	1	1	17%
2	18	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	12		2	2	100%	2	1	8%
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian								
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur	90		15			15	30	33%
2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Aparatur	300		50	50	100%	50	35	12%
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum								
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	210		35	35	100%	35	10	5%

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2023

2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik	324		25	25	100%	25	10	3%
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah jenis barang cetakan	52		22	22	100%	22	15	29%
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah eksemplar	504		500	500	100%	-		
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aparatur	1200		200	200	100%	200	50	4%
2	18	01	2.06	10	Pengelolaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip	4000		500	500	100%	500	100	3%
2	18	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah kegiatan/berita	144		24	24	100%	24	5	3%
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan BMD								
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	70		10	10	100%	10	3	4%
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa								
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	15000		2500	2500	100%	2500	500	3%
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Periode	72		12	12	100%	12	3	4%
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan	300		500	500	100%	50	40	13%

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2023

18	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pendukung Non PNS	245					49	49	20%
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD								
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan	288		48	48	100%	48	10	3%
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit	360		60	60	100%	60	10	3%
2	18	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Proyek (PMA/PMDN)								
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota									
2	18	02	2.02	02	Pernyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya peta Berbasis Aplikasi GIS	6		1	1	100%	1	1	17%
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya review naskah Akademis dan PERBUP	6					1	1	17%
18	02	2.01			Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota									
18	02	2.01	01		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya dokumen kajian kebijakan daerah perundangan di bidang penanaman	12					2	2	17%

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2023

						modal								
18	02	2.01	02		Evaluasi pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal									
2	18	03			Program Promosi Penanaman Modal	Junlah Investor (PMA/PMDN)								
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
2	18	02	2.02	01	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Mengikuti pameran promosi dalam daerah, luar daerah, dalam negeri dan luar negeri	18		3	3	100%	3	2	11%
2	18	02	2.02	02	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Media Promosi Digital	18					3	2	11%
2	18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Penerbitan Izin								
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2023

2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin yang diterbitkan	2540		40	40	100%	500	100	4%
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah izin yang diterbitkan	2540		40	40	100%	500	100	4%
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah izin yang diterbitkan	640		40	40	100%	100	25	4%
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah izin yang diterbitkan	190		40	40	100%	30	5	3%
2	18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kenaikan /Penurunan Nilai Realisasi PMDN								
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang dipantau	500		20	20	100%	100	25	5%
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang dibina	400		20	20	100%	100	25	6%
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang diAWASI	500		20	20	100%	100	25	5%

2	18	06			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Aplikasi								
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2	18	06	2.01	01	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Pengembangan dan Maintance Aplikasi	621		109	109	100%	1	1	5 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perangkat Daerah

Pada tahun 2021, target untuk indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah terpenuhi sebagaimana yang tercantum pada capaian kinerja pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara. Target tersebut kemudian mengalami perubahan pada tahun berikutnya. Namun, kondisi ekonomi yang tidak menentu pada tahun 2021 yang disebabkan oleh wabah Covid-19 dan isu politik lainnya, namun pencapaian target pada tahun berjalan tidak mempengaruhi capaian realisasi.

Dalam kondisi umum, pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai organisasi perangkat daerah urusan penanaman modal, menunjukkan hasil kinerja sangat baik berdasarkan Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci , diuraikan pada tabel 2 (T.C. 30) berikut :

TABEL T - C .30

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Indikator	SPM/ stand ar nasio nal	IKK	Target Renstra SKPD					Realisa si Capaia n Tahun 2021	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			64,64	68,00	72,00	75,00	80,00	86,76	80,75	80,75	
2	Jumlah/target Penanaman Modal PMDN/PMA (Triliyun Rupiah)			3,10	3,14	3,17	3,20	3,23	3,8	3,90	3,90	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			75	80	83	85	87	87.09	87	87	

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi PD

2.3.1 Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- e. pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang diberikan oleh Bupati; dan
- f. penyusunan laporan di Bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Sesuai dengan tugas dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara difokuskan pada Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi beberapa permasalahan dan hambatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain:

- a. Regulasi yang masih selalu berubah – ubah
- b. Aplikasi Sistem Perizinan Berusaha masih dalam proses pengembangan
- c. Belum terintegrasinya system perizinan berusaha antar K/L
- d. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dalam rangka pelayanan perizinan;
- e. Kurangnya sinergisitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka mewujudkan perbaikan iklim investasi.

2.3.3 Upaya Pencapaian Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara dan terhadap Capaian Program Daerah Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara “ ***Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berbahagia*** “

Dalam rangka pencapaian Visi secara efektif dan efisien disusunlah Misi Bupati Kutai Kartanegara, yaitu

1. Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani.
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya.
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah.
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara , sebagai garda depan investasi di Kutai Kartanegara, menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan untuk meningkatkan daya saing investasi daerah pada PMDN maupun PMA dan memberikan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha , dalam rangka mendukung misi 2 Bupati Kutai Kartanegara yaitu Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia unggul dan Berbudaya.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan perizinan dan investasi di Kutai Kartanegara, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi tantangan, antara lain:

- a. Data peta potensi investasi belum berstandar GIS sehingga informasi yang diberikan belum akurat dan belum tersebar luas kepada para pelaku usaha
- b. Belum dibuatnya peraturan daerah tentang pemberian insentif fasilitas kemudahan Penanaman Modal

- c. Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi
- d. Tingginya target realisasi investasi
- e. Tingginya target rasio pertumbuhan investasi
- f. Adanya ketidak sinkronisasi regulasi terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan antarm K/L
- g. Kurangnya SDM yang handal dalam proses pelayanan perizinan dan investasi
- h. Kurang sarana prasarana pendukung pelayanan perizinan

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

- a. Besarnya dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap penanaman modal dan perizinan
- b. Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara dan iklim yang baik, sangat mendukung investasi di sektor pariwisata, pertambangan, perkebunan, pertanian dan perikanan.
- c. Posisi geografis yang strategis karena sebagai IKN
- b. Infrastruktur transportasi yang mulai membaik

2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2022 Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan realisasi investasi PMDN dan PMA, serta pertumbuhan dan persebaran penanaman modal yang berorientasi kepada pengembangan potensi unggulan daerah.

Beberapa langkah strategis yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah:

1. Penyusunan strategi dan peningkatan promosi penanaman modal yang lebih inovatif
2. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan

3. Penyusunan regulasi kebijakan investasi dalam pemberian insentif dan fasilitas kemudahan Penanaman Modal
4. Peningkatan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan.
5. Pemutakhiran data peta potensi investasi dan peluang usaha Kabupaten Kutai Kartanegara berbasis sistem aplikasi
6. Peningkatan kualitas pengendalian (pemantauan, pembinaan dan pengawasan) pelaksanaan Penanaman Modal

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Program dan kegiatan yang dimasukkan dalam rancangan awal RKPD merupakan program usulan sebelum penyesuaian PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel di berikut ini.

TABEL T - C. 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal				19.983.370.644,00					18.732.721.371,00	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	15.583.370.644,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	13.934.588.371,00	
A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran & Evaluasi Kinerja	12 Dokumen	285.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran & Evaluasi Kinerja	12 Dokumen	71.600.000,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	2 Dokumen	65.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	2 Dokumen	11.300.000,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	OPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	OPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.700.000,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	OPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	OPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	

4	Koordinasi Dan Penyusunan DPA - SKPD	OPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	Koordinasi Dan Penyusunan DPA - SKPD	OPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.800.000,00	
5	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	OPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	OPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.800.000,00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	OPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	6 Dokumen	135.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	OPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	6 Dokumen	36.000.000,00	
	Adiminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	OPD	Cakupan Administrasi Keuangan	100%	11.494.932.823,00	Adiminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	OPD	Cakupan Administrasi Keuangan	100%	10.487.934.050,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	OPD	Jumlah ASN DPMPSTSP	12 Bulan	11.094.932.823,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	OPD	Jumlah ASN DPMPSTSP	12 Bulan	10.160.034.050,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	OPD	Jumlah dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	OPD	Jumlah dokumen	1 Dokumen	19.400.000,00	
3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	OPD	Jumlah dokumen	5 Dokumen	20.000.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	OPD	Jumlah dokumen	5 Dokumen	10.200.000,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	OPD	Jumlah dokumen	3 Dokumen	285.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	OPD	Jumlah dokumen	3 Dokumen	285.000.000,00	
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	OPD	Jumlah dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	OPD	Jumlah dokumen	1 Dokumen	13.300.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Dearah	OPD	Cakupan Administrasi BMD	100%	54.999.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Dearah	OPD	Cakupan Administrasi BMD	100%	26.999.000,00	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	OPD	Jumlah dokumen	1 Dokumen	14.999.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	OPD	Jumlah dokumen	1 Dokumen	14.999.000,00	

2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	OPD	Jumlah dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	OPD	Jumlah dokumen	2 Dokumen	12.000.000,00	
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	OPD			-						
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			100%	-	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			100%	-	
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	OPD	Jumlah dokumen SK	100%	-	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	OPD	Jumlah dokumen SK		-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Kepegawaian	100%	350.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Kepegawaian	100%	187.849.500,00	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	OPD	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Aparatur	100.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	OPD	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Aparatur	55.044.000,00	
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	OPD	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	75 Aparatur	250.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	OPD	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	75 Aparatur	132.805.500,00	
3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	OPD	Jumlah pakain dinas	300 stel	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	OPD	Jumlah pakain dinas		-	
4	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	OPD	Jumlah Dokumen	1 dokumen	-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	OPD	Jumlah Dokumen		-	
5	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	OPD	Jumlah Dokumen	2 dokumen	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	OPD	Jumlah Dokumen		-	
6	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	OPD	Jumlah Dokumen	3 dokumen	-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	OPD	Jumlah Dokumen		-	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Umum	100%	1.284.435.145,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Umum	100%	1.221.335.145,00	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OPD	Jumlah unit penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	35 Unit	155.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OPD	Jumlah unit penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	35 Unit	85.100.000,00	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	OPD	Jumlah jenis bahan logistik	25 Jenis	20.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	OPD	Jumlah jenis bahan logistik	25 Jenis	195.739.145,00	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	OPD	Jumlah jenis barang cetakan	22 jenis	100.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	OPD	Jumlah jenis barang cetakan	22 jenis	100.000.000,00	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	OPD	Jumlah buah dan Eksemplar	500 Eksemplar	45.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	OPD	Jumlah buah dan Eksemplar	500 Eksemplar	-	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OPD	jumlah aparatur yang melaksanakan rapat dan koordinasi/konsultasi	200 OK	691.935.145,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OPD	jumlah aparatur yang melaksanakan rapat dan koordinasi/konsultasi	200 OK	626.196.000,00	
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	OPD	jumlah dokumen/kegiatan	500 Dokumen	200.000.000,00	Pengelolaan Arsip Dinamis pada SKPD	OPD	jumlah dokumen/kegiatan	500 Dokumen	200.000.000,00	
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	OPD	jumlah kegiatan/berita	24 berita	72.500.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	OPD	jumlah kegiatan/berita	24 berita	14.300.000,00	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pengadaan BMD	100%	361.000.000,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pengadaan BMD	100%	295.867.000,00	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	OPD	Jumlah paket	10 paket	361.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	OPD	Jumlah paket	10 paket	295.867.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa	100%	1.430.153.676,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa	100%	1.320.153.676,00	

1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	OPD	Jumlah materai/prangko	2500 lembar	5.995.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	OPD	Jumlah materai/prangko	Jumlah materai/prangko	5.995.000,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	OPD	jumlah priode pembayaran	12 bulan	185.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	OPD	jumlah priode pembayaran	12 bulan	185.000.000,00	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	OPD	Jumlah Pendukung Non ASN	49 Orang	1.089.678.676,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	OPD	Jumlah Pendukung Non ASN	49 Orang	1.089.678.676,00	
4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OPD	jumlah jenis	50 jenis	149.480.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OPD	jumlah jenis	50 jenis	39.480.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pemeliharaan BMD	100%	322.850.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pemeliharaan BMD	100%	322.850.000,00	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	OPD	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan	48 Unit	263.620.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	OPD	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan	48 Unit	263.620.000,00	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	OPD	Jumlah unit Pemeliharaan	60 unit	59.230.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	OPD	Jumlah unit Pemeliharaan	60 unit	59.230.000,00	
II	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Jumlah Proyek (PMA/PMDN)	100%	1.200.000.000,00	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Jumlah Proyek (PMA/PMDN)	100%	1.200.000.000,00	
B	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	OPD	Jumlah Kajian dan Peta Potensi Investasi	2 Dokumen	850.000.000,00	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	OPD	Jumlah Kajian dan Peta Potensi Investasi	2 Dokumen	850.000.000,00	
1	Pernyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Kajian Potensi dan Peluang Hilirisasi Investasi	1 Dokumen	500.000.000,00	Pernyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Tersedianya peta Berbasis Aplikasi GIS	1 Dokumen	500.000.000,00	

2	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah RUPM	1 dokumen RUPM	350.000.000,00	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dalam Daerah dan Luar Daerah	tersedianya review naskah akademik dan PERBUP	2 dokumen	350.000.000,00	
C	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Kebijakan yang menjadi kewenangan Daerah Kab/ Kota		350.000.000,00	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Kebijakan yang menjadi kewenangan Daerah Kab/ Kota		350.000.000,00	
1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/Isentif dan kemudahan Penanaman Modal	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Kajian Kebijakan Daerah Perundangan di bidang Penanaman Modal	2 Dokumen	350.000.000,00	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/Isentif dan kemudahan Penanaman Modal	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Kajian Kebijakan Daerah Perundangan di bidang Penanaman Modal	2 Dokumen	350.000.000,00	
2	Evaluasi pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Insentif/ Fasilitas Kemudahan Investasi		-	Evaluasi pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Insentif/ Fasilitas Kemudahan Investasi		-	
III	Program Promosi Penanaman Modal		Jumlah Investor (PMA/PMDN)		700.000.000,00			Jumlah Investor (PMA/PMDN)		700.000.000,00	
D	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Promosi Ind.ustri / Hilirisasi		700.000.000,00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Promosi Ind.ustri / Hilirisasi		700.000.000,00	

1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Promosi Industri / Hilirisasi	4 Kegiatan Promosi	500.000.000,00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Promosi Industri / Hilirisasi	4 Kegiatan Promosi	500.000.000,00	
2	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Media Promosi Digital	3 Aplikasi	200.000.000,00	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Media Promosi Digital	3 Aplikasi	200.000.000,00	
IV	Program Pelayanan Penanaman Modal		Jumlah Penerbitan Izin		1.100.000.000,00	Program Pelayanan Penanaman Modal		Jumlah Penerbitan Izin		1.100.000.000,00	
F	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	OPD	IKM		1.100.000.000,00	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	OPD	IKM		1.100.000.000,00	
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Izin yang dilayani	500 Izin	300.000.000,00	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Izin yang dilayani	500 Izin	300.000.000,00	
2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Pemenuhan Komitmen	500 Persetujuan	300.000.000,00	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Pemenuhan Komitmen	500 Persetujuan	300.000.000,00	
3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Aduan yang terselesaikan	100 aduan	200.000.000,00	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Aduan yang terselesaikan	100 aduan	200.000.000,00	

4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Fasilitas / Insentif	30 Fasilitas	300.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Fasilitas / Insentif	30 Fasilitas	300.000.000,00	
V	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Kenaikan /Penurunan Nilai Realisasi PMDN		900.000.000,00	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Kenaikan /Penurunan Nilai Realisasi PMDN		1.298.133.000,00	
F	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Pengendalian PMA / PMDN		900.000.000,00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Pengendalian PMA / PMDN		1.298.133.000,00	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Persahaan PMA / PMDN yang dilakukan Pemantauan	100 perusahaan	200.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Persahaan PMA / PMDN yang dilakukan Pemantauan	100 perusahaan	300.000.000,00	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Perusahaan PMA / PMDN yang dilakukan Pembinaan	100 perusahaan	250.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Persahaan PMA / PMDN yang dilakukan Pembinaan	100 perusahaan	418.133.000,00	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Persahaan PMA / PMDN yang dilakukan Pengawasan	100 perusahaan	450.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Persahaan PMA / PMDN yang dilakukan Pengawasan	100 perusahaan	580.000.000,00	
VI	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Jumlah Aplikasi		500.000.000,00	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Jumlah Aplikasi		500.000.000,00	

G	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan, OPD dan Luar Daerah	Pengembangan dan Maintenance Aplikasi	15 Aplikasi	500.000.000,00	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan, OPD dan Luar Daerah	Pengembangan dan Maintenance Aplikasi	15 Aplikasi	500.000.000,00	
1	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Kecamatan, OPD dan Luar Daerah	Pengembangan dan Maintenance Aplikasi	15 Aplikasi	500.000.000,00	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Kecamatan, OPD dan Luar Daerah	Pengembangan dan Maintenance Aplikasi	15 Aplikasi	500.000.000,00	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi “Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur”.Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing.” Dalam rancangan teknokratik, RPJMN 2020-2024 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing,
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim,
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

RPJMN 2020-2024 menargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,4-6,0% /tahun, tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,5-7%, tingkat pengangguran terbuka (TPT) antara 4,0-4,6%, dan gini ratio mencapai 0,370-0,374. Target RPJMN ini menghadapi tantangan kondisi ekonomi global yang belum kondusif, merupakan dampak dari bencana virus corona (Covid-19) pada awal tahun 2020 dan ketidakpastian politik Amerika Serikat yang akan menghadapi Pemilihan Presiden pada akhir tahun 2020. Pada tahun 2021, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), mengusung tema “Meningkatkan investasi dan daya saing industri pariwisata untuk pertumbuhan ekonomi” dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 sebesar 5,3-5,7%. Menghadapi tantangan global dan domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan didorong melalui 3 sektor prioritas RKP 2021, yaitu sektor industri, sektor pariwisata, dan peningkatan sektor investasi pasca implementasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA PD

Dalam mendukung visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara (2021 – 2026), tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara tahun 2023 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan penanaman modal yaitu misi 1 dan 3 :

- Misi 1 “ Memantapkan Birokrasi yang Bersih Efektif, Efisien dan Melayani “
- Misi 3 “ Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian. pariwisata dann ekonomi kreatif “

Keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah pada RENJA 2023 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara berdasrkan Tujuan dan Sasaran urusan Penanaman Modal Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan misi 1 dan 3 Bupati Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut :

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran

**Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara
Tahun 2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3	4
1	Meningkatkan Transparansi dan Akutabilitas Kinerja Pembangunan	Meningkatkan Transparansi dan Akutabilitas Kinerja DPMPTSP	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan di DPMPTSP	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

- a. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara berupaya memberikan pelayanan yang mudah dan cepat kepada pelaku usaha dan mendorong kemudahan berinvestasi bagi para calon investor di Kutai Kartanegara. Program dan kegiatan yang disusun untuk tahun 2023 merupakan perwujudan dari usaha untuk mendukung visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara. Untuk mewujudkan iklim investasi daerah yang kondusif, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara menyusun kegiatan dengan fokus kepada pemetaan potensi investasi daerah, insentif/fasilitasi kemudahan berusaha, promosi dan pelayanan perizinan.
- b. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara pada tahun 2023, disusun berdasarkan dengan terbitnya PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019, dilakukan beberapa penyesuaian sehingga tidak lagi sesuai dengan RENSTRA 2021-2026, menjadi 5 (lima) program, yaitu :
 - (1) Program Pengembangan Iklim Investasi Penanaman Modal,
 - (2) Program Promosi Penanaman Modal
 - (3) Program Pelayanan Penanaman Modal,
 - (4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
 - (5) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan program yang berfokus pada kegiatan-kegiatan rutin penunjang penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari kegiatan administrasi umum, peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur, perencanaan

dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dan kegiatan administrasi keuangan. Program promosi penanaman modal berfokus pada kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Program ini diarahkan untuk mencapai target indikator jumlah investor, nilai investasi, daya serap tenaga kerja dan kenaikan/ penurunan nilai realisasi investasi PMDN dan PMA. Program pengembangan iklim penanaman modal diarahkan pada kegiatan penetapan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, dan kegiatan pembuatan peta potensi investasi Kabupaten. Hasil RENJA 2023 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara dari kegiatan dalam program ini nantinya akan memudahkan investor dalam menentukan nilai investasi dan menjadi acuan pengukuran kenaikan/ penurunan nilai realisasi investasi. Program pelayanan penanaman modal berfokus pada kegiatan penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah Kutai Kartanegara. Kegiatan ini bertujuan memberikan kemudahan dalam proses perizinan bagi investor dan akses pengaduan masyarakat. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal berfokus pada kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, bertujuan untuk memantau pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Kutai Kartanegara. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal berfokus pada kegiatan urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 disusun dengan memperhatikan target capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 2026 Untuk tahun 2023 terdiri dari 5 (lima) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan dengan kebutuhan dana sesuai dengan pagu indikatif yang telah diusulkan adalah sebesar Rp. **19.965.887.518,00** dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, diuraikan pada tabel berikut :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal				19.965.887.518,00				20.433.370.644,00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran & Evaluasi Kinerja		100%	15.563.370.644,00			100%	15.563.370.644,00
18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran & Evaluasi Kinerja			920.929.802,65			Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran & Evaluasi Kinerja	920.929.802,65
18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	198.995.000	APBD		1 Dokumen	198.995.000
18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	25.000.000,00	APBD		1 Dokumen	25.000.000,00

18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahann RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	20.000.000,00	APBD		1 Dokumen	20.000.000,00
18	01	2.01	04	Koordinasi Dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Lporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	20.000.000,00	APBD		1 Dokumen	20.000.000,00
18	01	2.01	05	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	20.000.000,00	APBD		1 Dokumen	20.000.000,00
18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	6 Dokumen	135.000.000,00	APBD		6 Dokumen	135.000.000,00
18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan			10.037.449.697,00				11.504.932.823,00
18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	81 orang/Bulan	10.627.449.697,00	APBD	dilakukan pegeseran pagu kegiatan untuk kegiatan lainnya	81 orang/Bulan	11.094.932.823,00

18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 laporan	65.000.000,00	APBD		1 Dokumen	65.000.000,00
18	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	110.450.000,00	APBD		1 Dokumen	30.000.000,00
18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Lporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	12 laporan	285.000.000,00	APBD		12 laporan	285.000.000,00
18	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	30.000.000,00	APBD		1 Dokumen	30.000.000,00
18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum			54.999.000,00				54.999.000,00
18	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	14.999.000,00	APBD		1 Dokumen	14.999.000,00
18	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	40.000.000,00	APBD		2 Dokumen	40.000.000,00
19	02	2.04	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD								-

18	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								
18	01	2.04	01	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah								
18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian			364.500.000,00				364.500.000,00
18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kutai Kartanegara	15 Aparatur	75.000.000,00	APBD		15 Aparatur	75.000.000,00
18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Kab. Kutai Kartanegara	50 Aparatur	112.500.000,00	APBD		50 Aparatur	112.500.000,00
18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	1 Stel per 127 Apartur	127.000.000,00	APBD		1 Stel per 127 Apartur	127.000.000,00
18	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
18	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				-				-
18	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara		50.000.000,00				50.000.000,00
18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum		100%	1.111.935.145,00				1.111.935.145,00
18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Paket	170.000.000,00	APBD		1 Paket	170.000.000,00

18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Paket	200.000.000,00	APBD		1 Paket	200.000.000,00
18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	2 Paket	100.000.000,00	APBD		2 Paket	100.000.000,00
18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Paket	30.000.000,00	APBD		1 Paket	30.000.000,00
18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Kutai Kartanegara	200 Laporan	561.935.145,00	APBD		200 Laporan	561.935.145,00
18	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinas Pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	500 Dokumen	50.000.000,00	APBD		500 Dokumen	50.000.000,00
18	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD								
18	01	2.08		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan BMD		100%	361.000.000,00	APBD		100%	361.000.000,00
18	01	2.08	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	25 Unit	361.000.000,00	APBD		20 Unit	361.000.000,00
18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa		100%	1.444.158.676,00			100%	1.444.158.676,00
18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	20.000.000,00	APBD		12 Laporan	20.000.000,00

18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	185.000.000,00	APBD		12 Laporan	185.000.000,00
18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	1.089.678.676,00	APBD		12 Laporan	1.089.678.676,00
18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	149.480.000,00	APBD		12 Laporan	149.480.000,00
18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD			322.850.000,00				322.850.000,00
18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Kartanegara	48 Unit	263.620.000,00	APBD		48 Unit	263.620.000,00
18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara	60 unit	59.230.000,00	APBD		60 unit	59.230.000,00
18	02			Program Pengembangan Iklim Pennanaman Modal	Jumlah Proyek (PMA/PMDN)			1.200.000.000,00				1.200.000.000,00
18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				850.000.000,00				850.000.000,00
18	02	2.02	02	Pernyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	500.000.000,00	APBD		2 Dokumen	500.000.000,00

18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Kutai Kartanegara	2 dokumen	350.000.000,00	APBD		2 Dokumen	350.000.000,00
18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				350.000.000,00				350.000.000,00
18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah / Provinsi dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	350.000.000,00	APBD		1 Dokumen	350.000.000,00
18	02	2.01	02	Evaluasi pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal								-
18	03			Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor (PMA/PMDN)		100%	950.000.000,00			100%	950.000.000,00
18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				950.000.000,00				950.000.000,00
18	03	2.01	01	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	750.000.000,00	APBD		1 Dokumen	750.000.000,00
18	03	2.01	02	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman ModalKewenangan Kabupaten / Kota	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	200.000.000,00	APBD		1 Dokumen	200.000.000,00
18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Penerbitan Izin		100%	1.100.000.000,00			100%	1.100.000.000,00

18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1.100.000.000,00				1.100.000.000,00
18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	500 Pelaku Usaha	300.000.000,00	APBD		500 Pelaku Usaha	300.000.000,00
18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	300 Kegiatan Usaha	300.000.000,00	APBD		300 Kegiatan Usaha	300.000.000,00
18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Kutai Kartanegara	100 Orang	200.000.000,00	APBD		100 Orang	200.000.000,00
18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Kordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	12 Kegiatan Usaha	300.000.000,00	APBD		12 Kegiatan Usaha	300.000.000,00

18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kenaikan /Penurunan Nilai Realisasi PMDN			900.000.000,00				900.000.000,00
18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			100%	900.000.000,00			100%	900.000.000,00
18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	100 Kegiatan Usaha	200.000.000,00	APBD		100 Kegiatan Usaha	200.000.000,00
18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	100 Pelaku Usaha	250.000.000,00	APBD		100 Pelaku Usaha	250.000.000,00
18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Dalam Daerah dan Luar Daerah	100 Kegiatan Usaha	450.000.000,00	APBD		100 Kegiatan Usaha	450.000.000,00
18	06			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Aplikasi		100%	700.000.000,00			100%	700.000.000,00
18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				700.000.000,00	APBD			700.000.000,00

18	06	2.01	01	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dalam Daerah dan Luar Daerah	127 Dokumen	700.000.000,00	APBD	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	700.000.000,00
----	----	------	----	---	--	------------------------------	-------------	----------------	------	--	----------------

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan dokumen yang akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, diharapkan dapat menunjang pencapaian visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara “ ***Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berbahagia*** ”

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja 2023 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance*.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) ini disusun dengan harapan dapat dianalisis dan dipertimbangkan dalam R-APBD Tahun Anggaran 2023 mendatang.

Tenggarong, Maret 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Kutai Kartanegara,



Dr. H. BAMBANG ARWANTO, AP., M.Si
NIP. 19740111 199311 1 002